

Community Participation in The Development Plan of Pelaihari Sub-District, Tanah Laut District in 2021

Raisha Dewina Sari*, Mahyuni, & Taharuddin

Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

Community involvement plays a crucial role in the process of development planning, which is a crucial stage in the overall development process. This process involves analyzing the needs and issues in the field and seeking recommendations for solutions that will be outlined in the form of planning documents. However, based on the results of the data analysis in the field, community participation in development planning in Pelaihari Village in 2021 is still low, as demonstrated by the lack of attendance of community representatives and the inadequate presence of resource persons. Besides, there need to be more proposals for the process of development planning consensus (Musrenbang). This study aims to investigate the reasons for the lack of community involvement in Pelaihari Village's development planning in 2021. Explanatory qualitative research methods are used in this study to gather information from sources including the Sub-District Heads of Pelaihari Village, a representative of the neighborhood head in Pelaihari Village, the head of Pelaihari District, and the head of the Tanah Laut Regency Development Planning Department. The findings of the field study on the reasons for low community involvement in development planning in Pelaihari Village in 2021 show that the first factor is the mindset of the people who still do not trust and understand the process of development planning and the benefits of their participation in it. The second is the technical factor of implementation which is still not optimal and not suitable for urban areas, and the last is the Pelaihari sub-district heads' lack of initiative in gathering information to share with the community and their lack of creativity in planning technological implementation and engaging the community. Finally, the recommendations in this study are directed at the Tanah Laut District Government, the Pelaihari District Head, and the Pelaihari Sub-District Head. They include improving technical implementation, changing community attitudes through socialization, and boosting village head initiatives and innovations.

Keywords: Involvement; Planning; Development; Development Planning.

1. Pendahuluan

Pembangunan oleh pemerintah baik dalam hal pembangunan fisik dan pembangunan pemberdayaan adalah merupakan hal yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat, karena masyarakat berharap bahwa pembangunan dapat membawa perubahan hidup yang lebih baik menuju kesejahteraan yang menjadi tujuan suatu negara (Ningrum, 2020). Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi hingga pemerintah daerah, termasuk kelurahan/desa yang mana proses awalnya selalu dimulai dari proses perencanaan pembangunan (Atmojo et al., 2017). Proses ini memerlukan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan menganalisis permasalahan serta kebutuhan di wilayah masing-masing, yang puncaknya dibahas pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel).

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi dari penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian oleh (Ripai, 2013) dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Bontomatene tergolong sedang, dengan faktor yang mempengaruhinya adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan masyarakat, penghasilan/ pendapatan yang paling penting adalah adanya kesadaran diri masyarakat secara pribadi yang dilandaskan pada agama yang dianutnya, serta faktor kepemimpinan dan peralatan di Kecamatan Bontomatene. Perbedaan penelitian (Ripai, 2013) dengan penelitian ini adalah lokus, metode penelitian, tujuan penelitian, dan teori yang digunakan sebagai alat ukur.

* Corresponding author.

E-mail address: raishadewinasari@gmail.com

Peneliti juga menemukan penelitian lain terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu oleh (RIDHO et al., 2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis M. Ridho adalah lokus, tujuan penelitian, metode penelitian, dan teori yang digunakan, dengan hasil penelitian yaitu banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Pasar Terusan, persentase partisipasi masyarakat juga masih kurang dan upaya pemerintah yang masih tidak maksimal dalam memanfaatkan potensi SDM masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Pasar Terusan.

Penelitian lain yang peneliti temukan adalah penelitian (Purnamasari, 2008) yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan hasil penelitian yaitu bahwa partisipasi masyarakat setempat masih rendah, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, dan secara legalitas masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Penelitian lain yang juga berhubungan dengan perencanaan pembangunan adalah penelitian dari (Nasution, 2010) yang berjudul Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area Kota Medan, dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan musrenbang di lokus tersebut sudah dalam kriteria baik, karena di dukung oleh komunikasi, sumber-sumber, struktur birokrasi, kecenderungan-kecenderungan, hambatan-hambatan yang teratasi serta hasil kegiatan yang baik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dari segi lokus, tujuan penelitian, metode penelitian, serta teori yang digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Penelitian terakhir yang ditemukan peneliti adalah dengan judul Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) oleh (Wibowo, 2009) dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa partisipasi masyarakat masih rendah karena pelibatan masyarakat dilaksanakan pada tahap penyelidikan hingga perumusan saja, sedangkan pada tahap identifikasi daya dukung hingga merancang anggaran tidak melibatkan masyarakat. Perbedaan penelitian (Wibowo, 2009) dengan penelitian ini adalah dari segi lokasi penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian hingga teori yang digunakan sebagai alat ukur.

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021 yang mana dilaksanakan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), ditemukan fakta bahwa usulan musrenbang sangat sedikit yaitu hanya 9 (sembilan) usulan fisik, tidak ada usulan pemberdayaan maupun usulan lain dari bidang pertanian, perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Tingkat kehadiran peserta musrenbang baik dari perwakilan RT maupun narasumber dari pihak yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan juga belum maksimal. Perencanaan pembangunan juga tidak berkelanjutan dan belum sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yang sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2013 tentang Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta Alokasi Pembiayaan Terhadap Prioritas Hasil Musrenbang Desa. Sementara Wicakso & Sugiarto dalam (Wijaya, 2003) mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif yaitu: (1) Terfokus pada kepentingan masyarakat; (2) Partisipatoris (keterlibatan); (3) Dinamis; (4) Sinergitas; (5) Legalitas; (6) Fisibilitas. Jika teori ini dikaitkan dengan bagaimana fakta pelaksanaan perencanaan pembangunan di kelurahan pelaihari pada tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut masih rendah

2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menganalisis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021. Peneliti lebih menggunakan pendekatan karena diharapkan peneliti dapat menghasilkan uraian-uraian rinci dari hasil tulisan, ucapan, dokumentasi, dari setiap individu maupun fenomena, karena (Creswell, 2015) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami mana yang diteliti oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal masalah sosial atau kemauan manusia. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipasi, menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan) dengan informan sebanyak 7 orang orang diantaranya Lurah Pelaihari, Camat Pelaihari, Bappeda Tanah Laut, Perwakilan Peserta Musrenbang (Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pelaihari).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pola Pikir Masyarakat

Berdasarkan data hasil musrenbang yang telah diketahui sebelumnya, terlihat bahwa proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021 tersebut hanya menghasilkan 9 (sembilan) usulan pembangunan fisik, padahal Kelurahan Pelaihari memiliki wilayah yang sangat luas dan membawahi banyak bidang seperti ekonomi sebagai pusat perdagangan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dengan jumlah sekolah terbanyak, sehingga belum mampu mencerminkan perencanaan yang fokus kepada kepentingan masyarakat dan belum mampu menggali masalah di berbagai bidang yang ada pada masyarakat serta lingkungan sekitar. Padahal pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pernah diungkapkan Conyers dalam Purnamasari (2008) tentang 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. (2) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. (3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat sangat penting yang menentukan apakah masyarakat ingin berpartisipasi pada perencanaan pembangunan, serta lebih jauh lagi tentang partisipasi dalam bentuk apa yang diberikan, bukan hanya sekedar kehadiran pada acara pertemuan musrenbang. Namun tentu saja itu semua tidak asal terbentuk, tapi berdasarkan apa yang masyarakat percayai dan alami dari proses perencanaan sebelum-sebelumnya.

Jika dibahas secara umum tidak hanya terkait kelurahan, bukan hanya dalam proses musrenbang, tentu dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menemui bahwa membangun kepercayaan adalah yang paling sulit, seperti dalam hubungan jual beli barang, jual beli jasa, hubungan keluarga dan pertemanan. Apalagi dalam hal ini, pemerintah sering memberikan gambaran buruk terkait bagaimana pemerintah bekerja untuk masyarakat khususnya dalam hal pembangunan, yang diberitakan di televisi, media sosial, koran dll. Pemerintah juga sering memberikan kesan buruk dalam hal menerima masukan masyarakat, atau protes masyarakat seperti yang kita sering lihat dalam kenyataan berita akhir-akhir ini terkait penyampaian demo yang diabaikan oleh pemerintah. Terlebih banyaknya pemberitaan tentang hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terkait dana yang dikorupsi, pembangunan yang gagal, pembangunan yang tidak tepat sasaran, pembangunan yang berpihak. Sehingga masuk akal bagi peneliti bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Camat Pelaihari bahwa adanya pola pikir masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah dalam hal perencanaan. Kemudian lebih jauh dijelaskan oleh Kepala Bappeda Tanah Laut bahwa: *“Belum fokus kepada kepentingan masyarakat karena peserta belum benar-benar mengerti apa tujuan pembangunan, sehingga pola pemikiran tidak sinkron”*

Penjelasan Kepala Bappeda Tanah Laut lebih jauh menggambarkan bahwa pola pikir masyarakat terkait perencanaan pembangunan seharusnya sinkron yang dibentuk dengan cara memahami apa tujuan pembangunan yang sebenarnya bisa dicapai apabila masyarakat mau menunjukkan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan.

Pemerintah seharusnya dapat memulai dengan pemahaman konsep pembangunan seperti bagaimana (Tjokroamidjojo, 2000) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Seandainya pemerintah dapat menanamkan atau menggambarkan pola pikir yang seperti ini, mungkin masyarakat akan perlahan merubah sendiri pola pikir mereka sendiri untuk lebih baik dalam memahami maksud dan tujuan pembangunan. Terkait tujuan yang dimaksud, Kepala Bappeda juga menambahkan bahwa: *“Saat melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksana dan peserta harus mengerti apa tujuan pembangunan itu, yaitu pertama untuk mensejahterakan masyarakat, kedua untuk mensukseskan program-program dari visi misi pemerintah yang sudah terdokumentasikan dalam RPJMD, ketiga menjawab permasalahan yang ada, keempat adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian”*

Pernyataan Kepala Bappeda Tanah Laut tersebut sangat sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, namun yang lebih ditekankan adalah makna bahwa tujuan-tujuan itu harus dijelaskan dan difahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga makna dari perencanaan pembangunan bukan hanya membangun fisik bangunan, namun berlaku bagi seluruh bidang atau aspek yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pola pikir perwakilan masyarakat Kelurahan Pelaihari mempengaruhi partisipasi saat pelaksanaan perencanaan pembangunan

pada tahun 2021. Berhubungan dengan ketiga pernyataan tersebut, perwakilan Ketua RT di Kelurahan Pelaihari yang pada saat itu menjadi peserta juga menyatakan bahwa: *“Sebenarnya kami menganggap musrenbang ini hanya rapat untuk mengusul saja, seperti rapat-rapat biasa.”*

Faktor pola pikir yang peneliti temukan juga relevan dengan yang disampaikan (Mikkelsen, 1999) terkait bagaimana partisipasi terbagi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; (2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; (3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; (4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; (5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Menurut peneliti, 6 (enam) pengertian tersebut secara umum sangat dengan definisi pola pikir yang ada pada paragraf sebelumnya, dan dengan hasil wawancara kepada narasumber dilapangan.

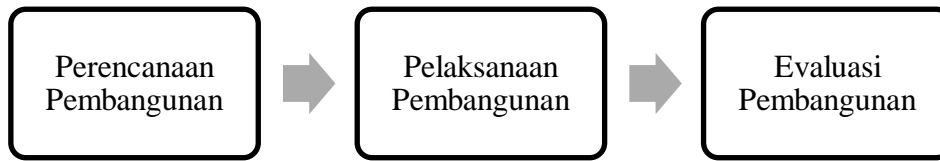
Penyebab pertama rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021 yang ditemukan pada penelitian ini adalah Pola Pikir sebagian masyarakat atau peserta perencanaan pembangunan yang masih belum mengerti arti pembangunan, tujuan pembangunan, dan manfaat pembangunan dan pentingnya partisipasi mereka dalam membentuk perencanaan yang baik, sehingga dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah lingkungan mereka serta memenuhi kebutuhan dalam rangka menunjang kesejahteraan. Sebagian masyarakat juga pesimis tentang tindak lanjut dari perencanaan dan menganggap musrenbang hanya seperti rapat biasa/bulanan. Selain itu mereka belum mampu mengidentifikasi manfaat pembangunan yang sudah mereka dapatkan, karena tidak tersosialisasikan oleh penyelenggara pembangunan.

3.2. Teknis Pelaksanaan

Setelah melakukan penelitian dilapangan melalui metode wawancara dan dokumentasi, ada banyak hasil penelitian yang secara umum menunjukkan bahwa salah satu faktor penting penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada saat perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari pada tahun 2021 adalah terkait teknis pelaksanaan. Seluruh narasumber yang peneliti lakukan wawancara, memberikan pernyataan bahwa kesalahan teknis pelaksanaan pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari pada tahun 2021 sangat berpengaruh pada rendahnya partisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) definisi dari teknis adalah bersifat atau mengenai, sedangkan definisi pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Tanah Laut dalam hasil wawancara yaitu: *“Karena selain pola pikir masyarakat dan kepemimpinan, sangat penting untuk menentukan teknis pelaksanaan yang efektif untuk digunakan di wilayah kepemimpinannya. Kelurahan seharusnya tidak hanya menunggu usulan dari peserta musrenbang, tapi seharusnya juga melakukan peninjauan langsung kelapangan, mengkaji, merumuskan saran-saran yang dapat direkomendasikan, hingga mengevaluasi”*

Pernyataan tersebut memberikan beberapa poin bahwa pertama, penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Pelaihari pada pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pola pikir masyarakat, kepemimpinan dan juga teknis pelaksanaan. Pada faktor teknis pelaksanaan, narasumber menekankan bahwa hal tersebut bukan terpaku pada pelaksanaan musrenbang saja, namun seharusnya dibagi menjadi beberapa proses lagi yang meskipun tidak terikat pada peraturan, namun tetap bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang baik.

Seperti penjelasan teori-teori pada bab II bahwa proses perencanaan ini bukanlah hanya sekedar pelaksanaan musrenbang saja. Jika secara sederhana proses pembangunan dapat dilihat dari diagram dibawah ini:



Gambar 1. Gambaran Alur Sederhana Proses Pembangunan

Jika melihat proses tersebut, dapat difahami bahwa jika pada proses pembangunan, perencanaan pembangunan adalah proses awal. Namun jika proses perencanaan pembangunan diuraikan, sebenarnya pelaksanaan musrenbang adalah salah satu tahap dari perencanaan pembangunan, seperti pada gambar dibawah ini:



Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Gambar 2. Tahap Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Gambar tersebut mencerminkan bahwa perencanaan adalah proses yang juga memiliki proses didalamnya, seperti teori dari dari (Kunarjo et al., 1996) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Berpijak dari ini penulis mendeskripsikan bahwa perencanaan adalah awal muasal sebuah kebijakan, yang didalamnya terdiri dari beberapa proses untuk mencapai kesepakatan terkait bagaimana mencapai suatu tujuan.

Pada proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021, teknis pelaksanaannya hanya difokuskan pada tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Padahal untuk Kelurahan Pelaihari yang memiliki luas wilayah dan keberagaman yang besar, diperlukan seminimalnya tiga tahap pada teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, yaitu tahap persiapan perencanaan, pelaksanaan musrenbang, dan evaluasi perencanaan. Tidak optimalnya teknis pelaksanaan dipengaruhi dari fakta bahwa pada saat persiapan perencanaan tidak ada sosialisasi pra musrenbang, kemudian pihak kelurahan hanya menunggu usulan dari peserta tanpa ada upaya aktif, dan usulan Ketua RT dipilah oleh Ketua RW tanpa ada ketentuan teknis yang mengatur. Kemudian penyebab tidak optimalnya pelaksanaan musrenbang yaitu materi perencanaan pembangunan hanya bertumpu pada Lurah Pelaihari dan dilaksanakan dengan durasi waktu yang terburu-buru, serta tidak ada upaya tambahan dalam membedakan antara musrenbang dan rapat bulanan. Terakhir adalah penyebab tidak optimalnya tahap evaluasi perencanaan disebabkan oleh tidak adanya konfirmasi balik dari Kelurahan Pelaihari setelah memutuskan secara sepihak hasil usulan prioritas ke Kecamatan Pelaihari, serta tidak ada informasi tindak lanjut hasil perencanaan pembangunan tahun sebelumnya.

3.3. Kepemimpinan

Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan pola pikir yang partisipatif dalam perencanaan tentu membutuhkan teknis pelaksanaan yang optimal, dan kepemimpinan adalah kunci dalam membentuk teknis pelaksanaannya serta mempengaruhi langsung pola pikir tersebut dengan seni pendekatan kepada masyarakat. Penyebab tidak optimalnya kepemimpinan yaitu pihak Kelurahan Pelaihari belum cukup berinisiatif dalam mencari tahu peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan perencanaan pembangunan kelurahan, informasi terkait isu kebijakan pembangunan di daerah, fokus RKPD dan program strategis masing-masing bidang (perdagangan, pertanian, peternakan, keagamaan dll) dalam rangka kerjasama antar SKPD. Lurah Pelaihari juga masih kurang dalam hal berinovasi dalam menggali informasi masalah dan kebutuhan di lapangan, dan dalam mempengaruhi kinerja pegawainya agar dapat optimal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

4. Kesimpulan

Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Pelaihari tahun 2021 adalah yaitu faktor pola pikir masyarakat yang masih belum mempercayai proses perencanaan pembangunan dan manfaat partisipasi dalam proses tersebut, kemudian faktor teknis pelaksanaan yang masih belum optimal dan tidak cocok pada wilayah perkotaan, karena hanya mengandalkan pada satu tahap yaitu musyawarah perencanaan pembangunan, dan terakhir yaitu faktor kepemimpinan Lurah Pelaihari yang belum optimal dalam berinisiatif dan berinovasi.

References

- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126–140.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Kunarjo, Swandhayani, & Sugiarto, S. (1996). *Perencanaan dan pembiayaan pembangunan*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*.
- Nasution, E. P. (2010). *Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Medan Area Kota Medan*.
- Ningrum, L. (2020). *Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Purnamasari, I. (2008). *Studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- RIDHO, M., Harun, H., & Fitra, T. R. (2021). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PASAR TERUSAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ripai, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*. Jakarta: Alfabeta.
- Wibowo, A. H. (2009). *ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF Studi Kasus Di kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. Universitas Diponegoro.
- Wijaya, R. (2003). *Forum pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan di era otonomi daerah:: Studi kasus di kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Universitas Gadjah Mada.